

SEJARAH JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN¹

PENGANTAR

Jurusan Politik dan Pemerintahan adalah jurusan tertua di Indonesia yang berkonsentrasi kepada kajian tentang dinamika politik dan pemerintahan di Indonesia, yang sama tuanya dengan sejarah bangsa ini. Cikal bakal Jurusan Politik dan Pemerintahan berasal dari kebutuhan akan kader untuk mengisi kekosongan personel di Departemen Dalam Negeri, salah satu departemen yang menopang struktur pemerintahan pada masa revolusi kemerdekaan. Hal ini dipengaruhi antara lain oleh pindahnya ibukota pemerintahan dari Jakarta ke Yogyakarta pada awal tahun 1946. Jurusan Pemerintahan waktu itu merupakan salah satu dari tiga bagian di Akademi Ilmu Politik selain Jurusan Hubungan Internasional dan Publisiteit (komunikasi).

Sebagai Jurusan tertua, Jurusan Ilmu Pemerintahan mengalami berbagai fase pasang surut pada masa lalu. Hal ini disebabkan oleh kondisi politik Indonesia yang masih berada dalam tahap perintisan dan proses penemuan jati diri. Pada awalnya kuatnya tekanan dunia internasional (baca: Belanda dan sekutunya) menjadi hambatan utama yang dihadapi Indonesia. Namun akhirnya UGM berhasil didirikan tahun 1949, setahun setelah pemberontakan PKI di Madiun. Hal ini dilanjutkan oleh tekanan politik dalam negeri yang bermuara pada peristiwa 30 September 1965.

Pergolakan politik turut mempengaruhi perkembangan dunia keilmuan di pendidikan tinggi. Pada kondisi politik yang tidak menentu sebelum 1967, berpengaruh terhadap cepatnya perubahan format pada tingkat fakultas dan jurusan. Fisipol UGM baru menemukan format tetap pada tahun 1955. Tekanan ini menjadikan Jurusan Pemerintahan sempat berubah nama tahun 1958 dan akhirnya didirikan lagi lima tahun kemudian.

Kondisi sejarah tersebut menggambarkan tingginya daya survivalitas dan menunjukkan pentingnya kajian pemerintahan dalam setiap pergantian rezim tanpa terkecuali. Pasang surut yang terjadi terhadap kajian tentang ilmu pemerintahan dapat

¹ Tulisan ini didasarkan wawancara mendalam dengan Josef Riwukaho pada tanggal 30 Juni 2007 sebagai satu-satunya pelaku sejarah jatuh bangunya JPP disamping konfirmasi dokumen dengan studi literatur. Ditulis dan diedit oleh Bayu Dardias setelah mendapatkan komentar dan masukan dari komunitas JPP. Editing terakhir tanggal 19 Juni 2010.

dimaknai sebagai upaya bidang ilmu ini untuk terus mengembangkan dirinya. Dari sejak awal proses berdirinya sampai dengan berkembang seperti saat ini, kajian ilmu pemerintahan menunjukkan arah perubahan maju yang sangat kentara.

Tulisan ini akan mengupas sekilas tentang sejarah JIP yang berdasarkan beberapa pilihan isu penting yaitu akademik, sistem pendidikan dan personel. Pembagian ini penting karena beberapa alasan, *pertama*, perkembangan akademik menjadi ruh dari setiap kajian ilmu yang dipakai untuk melihat tingkat perkembangannya. Kajian ilmu humaniora yang memberikan perhatian terhadap proses interaksi masyarakat termasuk pemerintahan mengalami perkembangan yang signifikan dari masa ke masa. Perkembangan akademik mampu menunjukkan arah kemajuan baik dalam fase survavilitas maupun dalam masa yang normal. *Kedua*, sistem pendidikan memberikan gambaran tentang proses delivery yang diberikan dalam proses pengajaran. Selain itu, sistem pendidikan memuat juga metode pendidikan yang digunakan. Pengamatan terhadap sistem pendidikan yang diterapkan dapat digunakan sebagai standar dalam melihat sejarah jurusan. *Ketiga*, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap jurusan selalu mengandalkan individu-individu civitas academica yang mumpuni untuk selalu berubah ke arah yang lebih baik. Secara lebih spesifik, Jurusan Ilmu Pemerintahan mengalami tahap bongkar pasang personel pada tahap awal survivalitias. Interaksi dan pola relasi personel di tengah situasi *scarcity*, perlu diperhatikan secara serius.

Selain berfokus kepada tiga hal di atas, tulisan ini dibagi berdasarkan periodisasi perkembangan jurusan berbasis fenomena penting yang terjadi di JPP. Terdapat setidaknya tiga tahapan penting yaitu Periode Perintis (1949-1962), Gejolak Politik dan fase Perjuangan (1963-1978) dan Tumbuh, Berkembang (1979-sekarang) dan epilog tentang perubahan nama jurusan. Tulisan ini akan diakhiri dengan sejarah pengurus jurusan dan perkembangan personel.

Periode Perintis: 1949-1962

Pindahnya pusat pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta tahun 1946 menuntut terpenuhinya tenaga terdidik untuk mengisi jabatan di hampir semua departemen. Tuntutan ini membuat pemerintah mendirikan sebuah akademi yang ditujukan guna memenuhi kebutuhan tenaga birokrasi di Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar

Negeri dan Departemen Penerangan. Institusi ini bernama Akademi Ilmu Politik (AIP) yang terdiri dari tiga jurusan yaitu Jurusan Pemerintahan, Jurusan Hubungan Internasional dan Jurusan Publisiteit. Pada tahap ini dan beberapa tahun kemudian, belum ada tambahan kata “ilmu” dalam penyebutan jurusan.

Sejak UGM berdiri tahun 1949, Akademi Ilmu Politik digabungkan dengan Fakultas Hukum. Hal ini menjadikan Fakultas Hukum terdiri dari dua bagian sesuai dengan elemen yang membentuknya yaitu menjadi Bagian Hukum dan Bagian Sosial dan Politik. Pada saat itu, pembelajaran belum dilakukan secara sistematis dan terstruktur mengingat kondisi dan psikologi kemerdekaan. Dilihat dari sisi keilmuan, penggabungan dengan Fakultas Hukum membuat kajian politik didominasi oleh pendekatan legal formal.

Kembalinya ibukota Indonesia ke Jakarta menjadikan beberapa pengajar di UGM turut hijrah ke Jakarta dan selanjutnya mendirikan Universitas Indonesia. Fakultas Hukum menjadi salah satu fakultas yang rencananya akan dipindah ke Jakarta karena kebutuhan tenaga birokrat yang belum terpenuhi. Namun pada akhirnya banyak pengajar yang tetap memutuskan untuk tinggal di Yogyakarta dan membangun UGM.

Pada tahun 1951, Fakultas Hukum ditambah dengan bagian baru Ekonomi yang merubah nama Fakultas Hukum menjadi Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik (Fakultas HESP). Pengelompokan ini dipilih berdasarkan kluster Humaniora. Fakta ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem pendidikan tinggi saat itu yang memaksa penggabungan bidang keilmuan menjadi fakultas tidak terkonsolidasi menjadi semakin spesifik tetapi justru menjadi semakin umum. Fakultas HESP memiliki Bagian yang sama dengan bidang keilmuan yang membentuknya yaitu Bagian Hukum, Bagian Ekonomi dan Bagian Sosial dan Politik. Bagian Sosial dan Politik terdiri dari Jurusan Pemerintahan, Hubungan Internasional dan Publisiteit.

Setelah berjalan selama dua tahun, terdapat penambahan jurusan baru yaitu jurusan Sosiologi pada tahun 1953 dan Jurusan Sosiatri tahun 1955. Pada tahun yang sama, Fakultas HESP dipecah kembali sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing yang nyata-nyata cukup sulit digabungkan dalam satu fakultas. Fakultas HESP berubah menjadi tiga fakultas yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Sosial dan Politik (Fakultas Sospol). Hal ini adalah perubahan terakhir yang berada pada tingkatan

Fakultas di UGM dan tetap bertahan hingga saat ini. Oleh karena itu, usia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM memperingati Dies Natalisnya sejak 1955.

Pada fase awal pendirian dan perkembangan UGM, setiap konsentrasi ilmu terdiri dari Jurusan dan Seksi. Jurusan membawahi urusan administrasi pendidikan dan pengajaran, sedangkan Seksi bertanggungjawab untuk mengembangkan ilmu yang menjadi bidang konsentrasinya, sehingga sebutan untuk Jurusan tidak disertai kata "ilmu". Kata "ilmu" disebutkan dalam Seksi. Sebagai contoh, penyebutan untuk Pemerintahan terbagi menjadi Jurusan Pemerintahan dan Seksi Ilmu Pemerintahan, dengan konsentrasi ilmu di Seksi Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 1966, Seksi diadukan dan diambil alih di jurusan sehingga setiap konsentrasi ilmu disebut sebagai "jurusan" dengan menambahkan kata "ilmu" sehingga perubahan menjadi Jurusan Ilmu Pemerintahan. Pada tahun yang sama, sistem semester dipergunakan walaupun penilaian masih menggunakan nilai absolut (angka). Nilai relatif (huruf) baru dipergunakan tahun 1973, berbarengan dengan pengukuran hasil studi menggunakan sistem indeks yang dikenal dengan Indeks Prestasi (IP).

Kembali ke tahun 1958, Jurusan Pemerintahan dan Seksi Ilmu Pemerintahan berubah namanya menjadi Jurusan Usaha Negara dan Seksi Ilmu Usaha Negara. Pada masa tersebut, Jurusan Pemerintahan beserta Seksi Pemerintahan tidak dikenal di UGM. Perlu dicermati bahwa pada masa kritis tersebut yang berada di tengah kondisi politik yang serba tidak menentu, mengganti nama jurusan dan seksi bukan persoalan yang sulit dan lebih berdasarkan pertimbangan praktis. Jika dicermati lebih teliti, proses tidak menentu ini berlangsung ketika terjadi perombakan kabinet dan munculnya pemberontakan-pemberontakan.

Hanya bertahan selama dua tahun, Jurusan dan Seksi Ilmu Usaha Negara berubah menjadi Jurusan dan Seksi Ilmu Administrasi Negara pada tahun 1960. Mengikuti perkembangan praktis yang terjadi saat itu, Jurusan Administrasi Negara dan Seksi Ilmu Administrasi negara hanya bertahan selama tiga tahun. Pada tahun 1963, Jurusan dan Seksi Ilmu Administrasi Negara pecah menjadi Jurusan Administrasi Negara dan Jurusan Pemerintahan serta Seksi Ilmu Administrasi Negara dan Seksi Ilmu Pemerintahan. Dengan kata lain, Jurusan dan Seksi Ilmu Pemerintahan sempat dibubarkan akibat pergantian nama selama lima tahun yaitu tahun 1958 sampai dengan tahun 1963.

Pada waktu itu sampai dengan sistem Indeks Prestasi diterapkan, sistem perkuliahan tidak menggunakan sistem semester tetapi menggunakan sistem tingkat yang berbasis pada tahun yaitu Tingkat I (Propadeuse), Tingkat II (Kandidat), Tingkat III (Bakalorat), Tingkat IV (doktoral). Pada setiap kelulusan tingkat, mahasiswa memperoleh penghargaan atas tingkat tahun yang berhasil dilaluinya dengan ijazah setiap tahun. Pada setiap tahun ajaran, mahasiswa juga diharuskan untuk melakukan pendaftaran ulang. Artinya, ada mahasiswa yang telah lulus tingkat dua dapat berhenti beberapa tahun untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya. Kondisi pendidikan Indonesia yang belum berkembang seperti saat ini memungkinkan mahasiswa memperoleh pekerjaan tanpa harus melampaui keseluruhan proses pendidikan, banyak diantaranya yang hanya berhenti pada tingkat pertama. Peringkat kelulusan pada setiap tingkatan waktu itu terbagi menjadi beberapa kategori dimulai dari yang paling buruk yaitu: Sangat Ragu-Ragu, Agak Ragu-Ragu, Ragu-ragu, Permufakatan, Tidak Keberatan dan Sama Sekali Tidak Keberatan.

Pada tahun 1973, sistem pendidikan dirubah dan hanya mengenal dua tingkat yaitu Sarjana Muda (BA) dan Sarjana. Untuk dapat memperoleh Sarjana Muda, mahasiswa diwajibkan memenuhi 111 SKS, sedangkan untuk dapat menyelesaikan sarjana penuh, mahasiswa harus menambah lagi dengan 49 SKS.

Gejolak Politik dan Fase Perjuangan: 1963-1978

Pada tahun 1963, Jurusan Pemerintahan dan Seksi Ilmu Pemerintahan mengalami tahap baru perkembangannya. Pada fase ini yang berlangsung hingga sekarang, Jurusan dan Seksi Ilmu Pemerintahan mengembangkan tonggak-tonggak disiplin Ilmu Pemerintahan. Pada waktu tersebut, Jurusan dan Seksi Ilmu Pemerintahan menerima 72 orang mahasiswa baru yang diajar oleh dosen-dosen yang beberapa diantaranya adalah Prof. Drs. Sudijono Wachid, Mariun BA, Drs. M Arifandi Saleh, Kapten Drs. Suwarno, Drs. Harhary, Drs. Soejoto Prodjosoejoto, Drs. Sugiyono SH, Drs. Uus Soedarsono dan Drs. Josef Riwu Kaho. Namun demikian, fase perjuangan Jurusan Pemerintahan tampaknya belum berakhir.

Di penghujung kekuasaan Soekarno tersebut, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang serius ditambah dengan inflasi yang menggila. Kebutuhan pokok menghilang dari pasaran. Beberapa orang mengisahkan jaman tersebut jaman yang sangat memprihatinkan. Hanya segelintir orang yang dapat makan nasi, sebagian besar diantaranya terpaksa makan palawija dan umbi-umbian dengan memakai pakaian yang seadanya. Para staf pengajar tidak terkecuali merasakan dampak krisis tersebut. Hal ini menyebabkan beberapa staf mengundurkan diri dari Jurusan dan Seksi Ilmu Pemerintahan. Pak Suwarno kembali ke Angkatan Darat, sebagaimana awal karier beliau. Harhary keluar dan berpindah ke Pemda Jawa Timur, Soejoto Prodjosoejoto ke Pemda, Uus Soedarsono masuk ke Agraria, Drs. M Arifandi Saleh pindah ke Universitas Cendrawasih dan turut membesarkan universitas tersebut di Papua.

Kesulitan yang dialami Jurusan dan Seksi Ilmu Pemerintahan masih terus berlangsung. Pada September 1965 meletuskan pemberontakan PKI. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik merupakan salah satu fakultas di UGM yang paling banyak kehilangan staf pengajar, akibat keterkaitan dengan PKI. Prof. Drs. Sudijono Wachid, Ketua Jurusan dan Seksi Ilmu Pemerintahan waktu itu diduga terlibat dalam Himpunan Sarjana Indonesia (HSI) yang merupakan organisasi *underbow* PKI. Walaupun tidak ditahan sebagai tahanan politik, beliau dipensiunkan dini dan tidak dapat lagi mengajar di Jurusan dan Seksi Ilmu Pemerintahan.

Pada tahun 1965 seluruh perkuliahan ditunda selama satu tahun dan baru diselenggarakan kembali pada bulan Agustus 1966. Sebelum dapat melanjutkan kuliah kembali, mahasiswa harus melalui proses *screening* untuk memastikan ketidakterlibatan dalam G30S dan ketidakterlibatan dalam PKI termasuk organisasi-organisasi yang terkait dengan PKI. Sejak tahun 1966, Dekan Fisipol dijabat oleh seorang perwira Polisi, AKBP R Soetarjo Kepala Kepolisian di Polda DIY, sebagai satu-satunya Polisi yang pernah tercatat menjadi Dekan Fisipol UGM.

Jurusan dan Seksi Ilmu Pemerintahan merupakan salah satu Jurusan yang harus menanggung banyak beban dari adanya pergolakan politik dan situasi yang tidak menentu ini. Sejak perkuliahan dibuka kembali dan diberlakukan sistem semester pada tahun 1967, hanya ting Mariun BA yang menjabat sebagai Ketua Jurusan, Drs. Sugiono, SH yang menjabat sebagai Ketua Seksi dan Drs. Josef Riwu Kaho sebagai staf.

Pada tahun 1967, Jurusan dan Seksi digabungkan menjadi Jurusan yang mengurus baik administrasi maupun akademik. Perbedaannya pada nama jurusan yang terakhir ini tetap ada kata ilmu sehingga nama jurusan disiplin ilmu pemerintahan menjadi Jurusan Ilmu Pemerintahan. Drs. Sugiono, SH yang kembali ke jajaran Pemerintah Daerah Provinsi DIY sehingga menyisakan hanya Mariun BA sebagai Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Drs. Josef Riwu Kaho sebagai Sekretaris Jurusan. Hal ini berlangsung hingga tahun 1975 ketika ada rekrutmen baru Sodjuangan Situmorang dan Afan Gaffar. Sodjuangan Situmorang kemudian pindah ke Departemen Dalam Negeri.

Mekanisme pengajaran di jurusan dilakukan dengan melibatkan dosen-dosen di jurusan lainnya dan beberapa birokrat untuk mengajar mahasiswa. Ditengah kondisi yang terjepit ini, Jurusan Ilmu Pemerintahan mampu meluluskan lulusan pertama pada tahun 1970. Lulusan pertama Jurusan Ilmu Pemerintahan adalah Ismail Ibrahim Indra Putra yang masuk tahun 1963, setelah JIP buka untuk yang kedua kalinya. Lulusan kedua dan ketiga masing-masing adalah Gunawan, Raja Intan Yusuf.

Pada saat Fisipol pindah dari Pagelaran Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat ke Bulaksumur yang kita tempati saat ini pada tahun 1972, praktis hanya tinggal Mariun BA dan Drs. Josef Riwu Kaho yang menghuni bangunan baru tersebut secara tetap. Disamping keduanya, terdapat dosen-dosen yang membantu jurusan secara berkala sesuai matakuliah yang diajarkan. Pada saat itu beberapa matakuliah yang diajarkan antara lain: Pengantar Ilmu Pemerintahan, Pemerintahan Daerah, Proses dan Teknik Perundang-undangan, Perimbangan Keuangan, Filsafat Pemerintahan, Pemerintahan Nasional, dan Pemerintahan Desa.

Pada tahun 1978, barbarengan dengan bubarnya BPA Sospol, Jurusan Ilmu Pemerintahan mendapatkan tiga tambahan dosen. Mereka adalah Miftah Thoha, Ibnu Syamsi dan Suhardiman Yuwono. Pada perkembangan selanjutnya, Miftah Thoha berpindah ke jurusan Administrasi Negara.

Tumbuh dan Berkembang 1979-sekarang

Sejak tahun 1979, dapat dikatakan Jurusan Ilmu Pemerintahan tidak lagi mengalami hambatan dan rintangan seperti periode sebelumnya. Kesulitan yang dihadapi JIP berkaitan dengan personel yang melanjutkan studi ke beberapa negara. Pada tahap ini,

kesulitan tenaga pengajar dilakukan dengan mekanisme memberikan ruang pada dosen-dosen dari jurusan lain atau individu yang kompeten untuk membantu proses pengajaran. Hambatan ini terasa betul ketika JIP baru memiliki beberapa dosen tetap yang sebagian diantaranya harus melanjutkan sekolah ke beberapa negara. Pada tahun 1979-1982, JIP terpaksa membagi stafnya untuk belajar di luar negeri dan beberapa diantaranya tetap melanjutkan sekolah di dalam negeri untuk tetap mempertahankan proses belajar mengajar. Kesulitan berkaitan dengan studi luar negeri staf belajar berlangsung hingga saat ini. Hal ini lebih dimaknai sebagai proses investasi jurusan terhadap dosen pengajar yang akan memberikan ilmu dan kajian baru yang akan mewarnai jurusan setelah kembali ke Yogyakarta.

Pada sisi yang lain, JIP mengalami pertumbuhan keilmuan yang cukup spektakuler dalam dua puluh tahun terakhir. Apabila pada tahap awal pendiriannya Jurusan Pemerintahan masih menitikberatkan pendekatan legal formal yang dapat dilihat dari banyaknya staf pengajar yang memiliki latar belakang studi hukum, perkembangan perubahan kurikulum yang semakin lama menunjukkan arah yang lebih baik dengan beralih ke pendekatan yang lebih komprehensif untuk mempelajari ilmu pemerintahan. Pendekatan menjadi beragam yang sebagai hasil investasi SDM ketika bersekolah di luar negeri. Pada awalnya, perubahan kurikulum merupakan proses internal yang terjadi di JIP dengan memaksimalkan kajian dosen yang telah menyelesaikan studi lanjut. Artinya, perubahan kurikulum masih merupakan proses tambal sulam terhadap kurikulum yang telah ada.

Perubahan paling signifikan sepanjang sejarah JIP dilakukan pada tahun 2006 dengan merubah secara revolusioner matakuliah, metode dan konsentrasi keilmuan. Kurikulum yang diberi nama Kurikulum JIP 2006 ini telah dipersiapkan selama dua tahun dengan sebuah perdebatan maraton untuk dapat menciptakan sistem pendidikan dan pengajaran yang jauh lebih terarah dan terpola sesuai dengan perkembangan kajian politik dan pemerintahan.

Perubahan Nama

Salah satu perubahan paling signifikan lainnya adalah perubahan nama Jurusan Ilmu Pemerintahan menjadi Jurusan Politik dan Pemerintahan (JPP) sesuai SK Rektor

No.53/P/SK/HT/ 2010 tanggal 4 Maret 2010. Hal ini seiring dengan perubahan UGM yang sedang bertransformasi berkaitan dengan statusnya yang tidak lagi menjadi universitas negeri sesuai Peraturan Pemerintah tahun 2000. Perubahan regulasi di tingkat nasional memaksa UGM, sebagai universitas terbesar dan terbaik di Indonesia, untuk menyesuaikan diri.

Perubahan ini seiring dengan perubahan struktural yang sangat fundamental di JPP. Saat ini JPP terdiri dari empat bagian yang saling mengisi yaitu bagian yang mengurus akademik tebagi menjadi Program Sarjana S1 Politik dan Pemerintahan, Program Pascasarjana S2 yang terdiri dari tiga konsentrasi: Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Politik Nasional dan HAM dan Demokrasi dan Program Doktoral S3 Ilmu Politik bekerjasama dengan Jurusan Hubungan Internasional dan Jurusan Ilmu Komunikasi. Disamping itu, JPP juga memiliki lembaga riset yang disebut Polgov (Politics and Government). Sebelum berada dalam satu payung JPP, program S2 dan S3 sebelumnya berada di bawah adminstasi Fakultas dan Sekolah Pascasarjana UGM. Polgov merupakan gabungan dari Laboratorium Ilmu Pemerintahan dan Divisi Riset dan Publikasi S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah.

Pembagian dua kluster penting yaitu, pendidikan dan pengajaran serta riset didasarkan pada kesimpulan bahwa pendidikan tidak bisa dilepaskan dari riset, pun sebaliknya. Keduanya adalah komponen yang saling mengisi dan saling menguatkan satu sama lain. Hasil penelitian lapangan menjadi bahan penting untuk menjelaskan teori dan konsep yang diajarkan di dalam kelas, dan teori dan konsep mampu menterjemahkan fenomena politik dan pemerintahan yang terus berubah.

Kepengurusan Jurusan

Salah satu poin penting yang tidak dapat dilewatkan dalam melihat perkembangan jurusan adalah perkembangan dan proses regenerasi staf jurusan. Pada prinsipnya, sebagaimana diberlakukan di Jurusan lainnya di Fisipol UGM, pengurus jurusan terdiri dari dua orang yaitu Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan. Pada tahun 2005, berbarengan dengan rekrutmen asisten JIP, struktur baru ditambahkan dalam kepengurusan Jurusan dengan menambahkan Ketua Laboratorium Jurusan sebagai unsur penting penopang kegiatan dan kajian akademik di Jurusan. Pada akhir tahun 2009 dibentuk Polgov sebagai

pengganti ketua Laboratorium. Berikut beberapa perkembangan kepengurusan jurusan dari waktu ke waktu.

A. Perintis

No	Nama
1	Prof. Drs. Sudjiono Wahid
2	Drs. M Afandi Saleh
3	Mariun, BA
4	Kapten Drs Suwarno
5	Drs. Harhary
6	Drs. Soejoto Projoseojoto
7	Drs. Sugiono, SH
8	Drs. Uus Sudarsono
9	Drs. Josef Riwukaho, MPA

B. Pensiun, Pindah, Meninggal Dunia

No	Nama	Rekrutmen	KEterangan
1	Prof. Drs. Sudijono Wachid		Pensiun dini tahun 1964
2	Drs. M Arifandi Saleh		Pindah ke Uncen
3	Mariun, BA		Pensiun tahun 1978
4	Kapten Drs. Suwarno		Kembali ke TNI tahun 1964
5	Drs. Harhari		Meninggalkan Jurusan
6	Drs. Soejoto Prodjosoejoto		Kembali ke birokrasi tahun 1964
7	Sugiono, Drs.SH		Kembali ke Pemda DIY tahun 1964
8	Uus Soedarsono, Drs.		Kembali ke Agraria tahun 1964
9	The Liang Gie Drs.	1967	Pindah Ke BPA Sospol dan kemudian ke Fak. Filsafat.
10	Prof. Afan Gaffar, Drs. MA, PhD	1975	Meninggal dunia tahun 2002
11	Dr. Sodjuangan Situmorang	1976	Pindah ke Departemen Dalam Negeri
12	Prof. Dr. Miftah Thoha, Drs, MPA	1978	Pindah ke Jurusan Adminstrasi Negara.
13	Ibnu Syamsi, Drs.	1978	Pensiun tahun 2001
14	Suhardiman Yuwono, Drs.	1978	Pensiun tahun 2002
15	Andre Bayo Ala, Drs, MA	1980	Meninggal dunia tahun 1993
16	Prof Riswandha Imawan, Drs, MA, PhD	1980	Meninggal dunia tahun 2006

C. Dosen Aktif

No	Nama	Rekrutmen	Status/Keterangan
1	Josef Riwukaho, Drs, MPA	1966	Aktif
2	Sri Djoharwinarli, Dra, SU	1968	Aktif
3	Mashuri Maschab, Drs, SU	1977	Aktif
4	Haryanto, Drs, MA	1980	Aktif (studi S3)
5	Ratnawati, Dra. SU	1983	Aktif (studi S3)
6	Prof. Pratikno, Drs, MSoc.Sc, PhD	1986	Aktif
7	Purwo Santoso, Drs, MA, PhD	1988	Aktif
8	Cornelis Lay, Drs, MA	1988	Aktif (studi S3)
9	Bambang Purwoko, Drs, MA	1990	Aktif
10	I Ketut P Erawan, Drs, MA, PhD	1990	Aktif
11	RB. Abdul Gafar, SIP, MA	1996	Aktif (PhD candidate)
12	AAGN Ari Dwipayana, SIP, M.Si	1997	Aktif (studi S3)
13	Amalinda Savirani, SIP, MA	2002	Aktif (PhD candidate)
14	Mada Sukmajati, SIP, MPP	2002	Aktif (PhD candidate)
15	Wawan Mas'udi, SIP, MPA	2002	Aktif
16	Nur Azizah, SIP, Msc	2005	Aktif
17	Sigit Pamungkas, SIP, MA	2005	Aktif
18	Miftah Adi Ikhsanto, SIP, MiOP	2006	Aktif
19	Nanang Indra Kurniawan, SIP, MPA	2008	Aktif
20	Bayu Dardias Kurniadi, SIP, MA, MPP	2008	Aktif

D. Dosen Tamu

No	Nama	Status/Keterangan
1	Yando Zakaria	Perkumpulan KARSA
2	Sutoro Eko, SIP.M.Si	Dosen APMD
3	Abdul Gofar	Partai Gerindra
4	Arief Nur Hartanto, M..Si	Ketua DPRD Kota Yogyakarta
5	Dr. Bambang Hidayana	Dosen FIB UGM
6	Budi Santoso	LBH Yogyakarta
7	Drs. M. Najib. M.Si	Anggota KPU Yogyakarta
8	J. Nicolaas Warouw, B.A, Phd	Dosen Antropologi UGM
9	Tavip AR	Pemprov DIY
10	Fajar Sudjarwo	IRE Yogyakarta

Disamping itu, saat ini Jurusan Ilmu Pemerintahan memiliki asisten dosen dan asisten peneliti yaitu:

No	Nama	Rekrutmen Asisten	Status/Keterangan
1	Hasrul Hanif, SIP, MA	2005	Aktif
2	Longina Novadona Bayo , SIP, MA	2005	Aktif
3	Utah Parlindungan, SIP	2009	Aktif (Polgov)
4	Desi Rahmawati, SIP	2009	Aktif (Polgov)
5	Rahmat Gustomy, SIP	2010	Aktif (Polgov)
6	Wigke Capriati, SIP	2010	Aktif (Polgov)
7	Ristyian W	2010	Aktif (Polgov)

E. Perkembangan Pengurus Jurusan

No	Ketua Jurusan	Sekretaris Jurusan	Ketua Lab/Polgov	Tahun	Keterangan
1	Sudijono Wachid	-	-	1963-1966	Sekaligus sebagai ketua Seksi
2	Mariun	Sugiyono	-	1966-1967	Sugiyono pindah ke Pemda DIY
3	Mariun	Josef Riwu Kaho	-	1968-1970	
4	Josef Riwu Kaho	Mashuri Maschab	-	1970-1977	
5	Mashuri Maschab (PLH)	-	-	1977-1979	Pelaksana Harian, Josef Riwu Kaho studi ke Filipina
6	Josef Riwu Kaho	Mashuri Maschab	-	1979-1989	
7	Afan Gaffar	Haryanto	-	1989-1995	
8	Haryanto	Ratnawati	-	1996-1998	
9	Haryanto	Bambang Purwoko	-	1998-1999	
10	Sri Djohar-winarlien	Bambang Purwoko	-	1999-2003	
11	Purwo Santoso	AAGN Ari Dwipayana	-	2003-2005	
12	Riswandha Imawan	Amalinda Savirani	Cornelis Lay	2005-2006	Amalinda studi ke Belanda
13	Cornelis Lay	Mada Sukmajati	AAGN Ari Dwipayana	2006-2007	Mada studi ke Jerman
14	Cornelis Lay	Wawan Mas'udi	Miftah Adhi I	2007-2008	Restrukturisasi Jurusan

15	Cornelis Lay	Wawan Mas'udi	RB. Abdul Gafar	2008-2012	Lab berubah menjadi Polgov. Purwo Santoso dan Ratnawati masing-masing sebagai menjadi ketua dan sekretaris Program S2 dan S3.
----	--------------	------------------	--------------------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------